

Fenomena Perbatasan Laut Natuna Utara: Strategi Penguatan Ekonomi Maritim Indonesia dalam Menghadapi Tantangan Geopolitik

Septiani Manoppo^{a,1}, Gilang Islami Biki^{b,2}, Nicki Lumentut^{c,3}, Christian Rompis^{d,4}

^{a, b, c, d} Universitas Sam Ratulangi, Manado, Indonesia

e-mail: septianimanoppo@icloud.com¹, gilangbiki85@gmail.com², nickilumentut@gmail.com³, christianrompis909@gmail.com⁴

Correspondence author: septianimanoppo@icloud.com

Keywords: ABSTRACT

maritime
economy,
geopolitics,
North Natuna
Sea, blue
economy,
marine
resources.

This research is motivated by the increasing geopolitical dynamics in the North Natuna Sea, which have a direct impact on the potential and management of Indonesia's maritime economy, particularly in the context of marine resource utilization and the stability of border areas. The main issue addressed in this study is how geopolitical challenges affect Indonesia's maritime economic strengthening strategies and how the optimization of marine resource management can be carried out sustainably. This study aims to analyze Indonesia's maritime economic strengthening strategies in response to geopolitical pressures and to identify effective approaches to maritime area management. The theoretical framework employed in this research includes maritime geopolitics theory and the concept of the blue economy, which emphasizes the sustainable utilization of marine resources while maintaining a balance between economic development, environmental preservation, and security. This study adopts a qualitative method with a descriptive-analytical approach through a literature review of various policy documents, scientific journals, and official reports. The findings indicate that the North Natuna Sea faces significant geopolitical pressures; however, it possesses substantial maritime economic potential if managed through an integrated strategy encompassing security, diplomacy, and economic development. In addition, challenges remain in terms of policy coordination and the monitoring of marine resources. The study concludes that strengthening Indonesia's maritime economy requires a comprehensive and sustainability-based strategy to safeguard national sovereignty while enhancing public welfare.

1. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki wilayah laut lebih luas dibandingkan daratan. Posisi geografis Indonesia yang berada di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik menjadikan wilayah perairannya memiliki nilai strategis dari aspek ekonomi, politik, pertahanan, dan keamanan. Salah satu kawasan yang memiliki arti penting bagi kepentingan nasional Indonesia adalah Laut Natuna Utara. Wilayah ini berada di bagian utara Kepulauan Natuna dan berbatasan langsung dengan kawasan Laut Cina Selatan yang selama beberapa dekade menjadi salah satu titik ketegangan geopolitik di kawasan Asia Pasifik. Laut Natuna Utara memiliki potensi sumber daya alam yang sangat besar. Sektor perikanan di kawasan ini menyimpan cadangan ikan yang melimpah dan menjadi sumber mata pencaharian utama bagi masyarakat pesisir. Selain itu, wilayah Natuna juga dikenal memiliki cadangan minyak dan gas bumi yang termasuk terbesar di Indonesia. Potensi tersebut menjadikan Laut Natuna Utara sebagai salah satu aset strategis nasional yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi, ketahanan energi, dan pembangunan wilayah perbatasan. Namun demikian,

besarnya potensi ekonomi yang dimiliki belum sepenuhnya dapat dimanfaatkan secara optimal karena berbagai tantangan yang dihadapi.

Dalam beberapa tahun terakhir, Laut Natuna Utara menjadi perhatian internasional akibat meningkatnya dinamika geopolitik di kawasan Laut Cina Selatan. Klaim sepihak Republik Rakyat Tiongkok melalui *nine dash line* yang bersinggungan dengan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia menimbulkan berbagai persoalan yang berkaitan dengan kedaulatan dan hak berdaulat Indonesia. Kehadiran kapal nelayan asing, kapal penjaga pantai Tiongkok, serta maraknya praktik *Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing* (IUUF) menunjukkan bahwa kawasan ini tidak hanya menghadapi tantangan ekonomi, tetapi juga tantangan keamanan dan politik yang kompleks. Di sisi lain, pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya untuk mempertahankan kedaulatan di Laut Natuna Utara melalui penguatan diplomasi, peningkatan kapasitas pertahanan, pembangunan infrastruktur maritim, serta pengembangan ekonomi wilayah perbatasan. Meskipun demikian, berbagai penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat sejumlah hambatan, seperti lemahnya koordinasi antar instansi, keterbatasan pengawasan wilayah laut, rendahnya produktivitas sektor perikanan, serta belum optimalnya pengelolaan sumber daya laut. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara potensi yang dimiliki dan kemampuan pemanfaatannya untuk mendukung kesejahteraan masyarakat maupun kepentingan nasional.

Berbagai penelitian terdahulu cenderung membahas Laut Natuna Utara dari sudut pandang yang terpisah, seperti keamanan maritim, sengketa wilayah, diplomasi, maupun pengelolaan sumber daya alam. Padahal, tantangan yang dihadapi Indonesia di kawasan ini bersifat multidimensional dan saling berkaitan. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif dengan menempatkan penguatan ekonomi maritim sebagai bagian dari strategi nasional dalam menghadapi tekanan geopolitik sekaligus memperkuat kedaulatan negara. Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fenomena perbatasan Laut Natuna Utara serta mengidentifikasi strategi penguatan ekonomi maritim Indonesia dalam menghadapi tantangan geopolitik. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan studi geopolitik maritim dan ekonomi maritim, serta menjadi bahan pertimbangan bagi perumusan kebijakan pengelolaan wilayah perbatasan yang berkelanjutan.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitis. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian bertujuan untuk memahami dan menganalisis fenomena perbatasan Laut Natuna Utara secara mendalam, khususnya terkait hubungan antara tantangan geopolitik dan strategi penguatan ekonomi maritim Indonesia. Pendekatan ini memungkinkan peneliti mengkaji berbagai aspek yang saling berkaitan, seperti keamanan maritim, diplomasi, pengelolaan sumber daya laut, pembangunan wilayah perbatasan, dan kedaulatan negara. Jenis penelitian yang digunakan adalah studi pustaka (*library research*). Studi pustaka dipilih karena penelitian berfokus pada analisis berbagai sumber tertulis yang relevan dengan tema penelitian. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari artikel jurnal ilmiah, buku, dokumen kebijakan pemerintah, laporan lembaga nasional dan internasional, serta berbagai publikasi yang berkaitan dengan Laut Natuna Utara, ekonomi maritim, keamanan maritim, dan geopolitik kawasan Indo-Pasifik. Pendekatan ini memungkinkan peneliti memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai dinamika yang terjadi di Laut Natuna Utara berdasarkan hasil penelitian dan kajian yang telah dilakukan sebelumnya.

Sumber data utama dalam penelitian ini berasal dari dua belas artikel jurnal yang membahas berbagai aspek terkait Laut Natuna Utara, meliputi isu geopolitik, keamanan maritim, sengketa Laut Cina Selatan, diplomasi Indonesia, pengelolaan sumber daya laut, pembangunan wilayah perbatasan, ekonomi kelautan dan perikanan, serta potensi minyak dan gas bumi. Selain itu, penelitian juga memanfaatkan dokumen hukum dan kebijakan seperti United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, serta berbagai kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan pengelolaan wilayah perbatasan dan pembangunan ekonomi maritim.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Potensi Strategis Laut Natuna Utara

[illegible]

Sumber: Yudha dan Dina (2020)

60	JlPI, Vol.02, Nomor 01, 2026, hal 58-69
----	---

ekonomi secara terintegrasi. Temuan ini diperkuat oleh Mira, Solihin, dan Tajerin (2013) yang menyatakan bahwa sektor kelautan dan perikanan merupakan sektor unggulan di wilayah perbatasan, termasuk Natuna, karena memiliki sumber daya yang melimpah dan menjadi sumber penghidupan utama masyarakat pesisir.



Gambar 2. Potensi Ekonomi Maritim Natuna

Sumber: Diolah Penulis dari Berbagai Sumber

Potensi perikanan Natuna juga didukung oleh kondisi geografis yang berada di wilayah perairan kaya sumber daya ikan. Menurut Syahdanur dan As'ari (2017), sumber daya laut menjadi fondasi utama aktivitas ekonomi masyarakat Natuna. Namun, penelitian tersebut menegaskan bahwa keberhasilan pemanfaatan sumber daya laut tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan sumber daya alam, tetapi juga oleh faktor sosial, ekonomi, dan kelembagaan yang mendukung pengelolaannya. Dengan kata lain, besarnya potensi perikanan harus diimbangi dengan kapasitas pengelolaan yang memadai agar dapat memberikan manfaat ekonomi secara berkelanjutan. Selain sektor perikanan, Natuna juga memiliki potensi besar pada sektor energi, khususnya minyak dan gas bumi. Purwatiningsih dan Masykur (2012) menjelaskan bahwa Laut Natuna bagian utara memiliki cadangan minyak dan gas bumi yang sangat besar dan berperan penting dalam mendukung ketahanan energi nasional. Potensi tersebut tidak hanya memberikan kontribusi terhadap penerimaan negara, tetapi juga berpeluang mendorong pembangunan ekonomi daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan. Argumen ini diperkuat oleh Rianty dan Mulyanie (2025) yang menyatakan bahwa cadangan migas Natuna merupakan aset strategis nasional yang dapat membantu mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor energi sekaligus memperkuat posisi Indonesia dalam menjaga keamanan energi jangka panjang.

Di samping potensi ekonomi, posisi geografis Natuna juga memberikan nilai strategis yang tinggi. Natuna berada di kawasan yang berdekatan dengan Laut Cina Selatan, salah satu jalur perdagangan internasional tersibuk di dunia. Menurut Haerulloh dan Martani (2023), posisi tersebut menjadikan Natuna memiliki peran penting dalam menjaga kepentingan nasional Indonesia, baik dari aspek ekonomi maupun keamanan. Keberadaan sumber daya alam yang melimpah dan lokasinya yang strategis menjadikan Natuna sebagai wilayah yang memiliki nilai geopolitik tinggi serta menjadi bagian penting dalam upaya menjaga kedaulatan Indonesia di kawasan perbatasan. Meskipun demikian,

berbagai penelitian menunjukkan bahwa besarnya potensi yang dimiliki Natuna belum sepenuhnya diikuti oleh tingkat pemanfaatan yang optimal. Mira, Solihin, dan Tajerin (2013) menemukan bahwa keterbatasan infrastruktur, mahalnya biaya operasional, lemahnya kelembagaan ekonomi, serta praktik *illegal fishing* masih menjadi hambatan dalam pengembangan ekonomi wilayah perbatasan. Temuan serupa juga disampaikan oleh Syahdanur dan As'ari (2017) yang menunjukkan bahwa berbagai kendala sosial ekonomi masih memengaruhi kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya laut secara maksimal. Oleh karena itu, potensi strategis Laut Natuna Utara tidak hanya perlu dilihat dari besarnya sumber daya yang tersedia, tetapi juga dari kemampuan negara dalam mengelola dan mengoptimalkan sumber daya tersebut untuk mendukung pembangunan ekonomi dan penguatan kedaulatan nasional secara berkelanjutan.

3.2. Tantangan Geopolitik di Laut Natuna Utara

Laut Natuna Utara merupakan salah satu kawasan yang memiliki tingkat kompleksitas geopolitik tinggi karena berada di wilayah yang beririsan dengan dinamika sengketa Laut Cina Selatan. Selain memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah, kawasan ini juga menjadi titik pertemuan berbagai kepentingan strategis negara-negara di kawasan Asia Pasifik. Kondisi tersebut menjadikan Laut Natuna Utara tidak hanya penting dari aspek ekonomi, tetapi juga memiliki nilai strategis dalam konteks keamanan dan kedaulatan negara. Salah satu tantangan geopolitik utama yang dihadapi Indonesia di Laut Natuna Utara adalah klaim sepihak Tiongkok melalui konsep *Nine Dash Line*. Berdasarkan penelitian Maulana, Ibrahim, dan Bunari, klaim tersebut mencakup sebagian wilayah yang menurut ketentuan United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982 merupakan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa meskipun Indonesia bukan negara pengklaim dalam sengketa Laut Cina Selatan, klaim *Nine Dash Line* tetap menimbulkan persoalan karena bersinggungan dengan hak berdaulat Indonesia di sekitar Kepulauan Natuna. Temuan ini diperkuat oleh Veronika, Balawanga, dan Subandi (2026) yang menyatakan bahwa sengketa maritim di Laut Natuna Utara muncul akibat perbedaan dasar hukum antara Indonesia yang berpegang pada UNCLOS 1982 dan Tiongkok yang menggunakan klaim historis sebagai dasar legitimasi wilayahnya.



Gambar 3. Arena Konflik di Kawasan Laut Natuna

Sumber: KKP Republik Indonesia

Tantangan geopolitik tersebut semakin kompleks dengan meningkatnya aktivitas kapal asing di kawasan Laut Natuna Utara. Menurut Ekaputra dkk (2025), praktik *Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing* (IUUF) masih menjadi ancaman serius bagi keamanan maritim Indonesia. Penelitian tersebut

menemukan bahwa kapal-kapal asing, terutama dari Vietnam dan Tiongkok, kerap melakukan aktivitas penangkapan ikan di wilayah ZEE Indonesia. Bahkan dalam beberapa kasus, aktivitas tersebut mendapat pengawasan dari kapal penjaga pantai negara asalnya sehingga persoalan yang awalnya bersifat ekonomi berkembang menjadi isu keamanan dan kedaulatan negara. Temuan ini sejalan dengan penelitian Villia, Kaka, dan Subandi (2026) yang menunjukkan bahwa pelanggaran wilayah oleh kapal asing menjadi salah satu faktor yang memengaruhi stabilitas keamanan Indonesia selama periode 2021–2023.

Selain ancaman terhadap sumber daya perikanan, kehadiran kapal penjaga pantai dan kapal pemerintah asing di sekitar Natuna juga meningkatkan potensi ketegangan antarnegara. Menurut Haerulloh dan Martani (2023), tantangan yang dihadapi Indonesia tidak hanya berkaitan dengan pelanggaran wilayah, tetapi juga menyangkut upaya mempertahankan kedaulatan di tengah meningkatnya rivalitas geopolitik kawasan. Kondisi ini menuntut Indonesia untuk menjaga keseimbangan antara penegakan hak berdaulat dan stabilitas hubungan internasional. Argumen tersebut diperkuat oleh Yayat Ruyat (2020) yang menjelaskan bahwa Indonesia harus mengombinasikan pendekatan diplomasi, hukum internasional, dan pertahanan untuk menjaga kepentingan nasional di Laut Natuna. Di sisi lain, beberapa penelitian menunjukkan bahwa tantangan geopolitik di Laut Natuna Utara tidak hanya berasal dari faktor eksternal, tetapi juga dipengaruhi oleh berbagai kendala internal. Haerulloh dan Martani (2023) menemukan bahwa koordinasi antarinstansi maritim yang belum optimal, keterbatasan armada patroli, serta tumpang tindih kewenangan antar lembaga masih menjadi hambatan dalam menjaga keamanan wilayah laut Indonesia. Temuan tersebut sejalan dengan penelitian Ekaputra dkk (2025) yang menyoroti luasnya wilayah pengawasan dan terbatasnya kehadiran aparat keamanan sebagai faktor yang menyebabkan praktik IUUF masih terus terjadi.

Meskipun demikian, terdapat perbedaan pandangan mengenai strategi yang paling efektif untuk menghadapi tantangan geopolitik tersebut. Villia, Kaka, dan Subandi (2026) menekankan pentingnya penguatan pertahanan dan kerja sama keamanan dengan negara-negara mitra sebagai bentuk balancing terhadap tekanan eksternal. Sebaliknya, Veronika, Balawanga, dan Subandi (2026) berpendapat bahwa diplomasi preventif dan pemanfaatan instrumen hukum internasional merupakan pendekatan yang lebih tepat untuk menghindari eskalasi konflik terbuka. Perbedaan pandangan tersebut menunjukkan bahwa tantangan geopolitik di Laut Natuna Utara tidak dapat diselesaikan hanya melalui satu instrumen kebijakan, melainkan memerlukan kombinasi antara diplomasi, pertahanan, penegakan hukum, dan pembangunan ekonomi. Berdasarkan berbagai penelitian tersebut, dapat dipahami bahwa tantangan geopolitik di Laut Natuna Utara bersifat multidimensional dan melibatkan aspek kedaulatan, keamanan maritim, ekonomi, serta hubungan internasional. Klaim *Nine Dash Line*, praktik IUUF, kehadiran kapal asing, dan keterbatasan kapasitas pengawasan menjadi faktor utama yang memengaruhi stabilitas kawasan. Oleh karena itu, pengelolaan Laut Natuna Utara memerlukan strategi yang komprehensif agar Indonesia tidak hanya mampu mempertahankan hak berdaulatnya, tetapi juga dapat mengoptimalkan potensi ekonomi maritim yang dimiliki di tengah dinamika geopolitik kawasan yang terus berkembang.

3.3. Dampak Tantangan Geopolitik terhadap Ekonomi Maritim

Dinamika geopolitik yang terjadi di Laut Natuna Utara tidak hanya berdampak pada aspek keamanan dan kedaulatan negara, tetapi juga memengaruhi perkembangan ekonomi maritim Indonesia. Sebagai wilayah yang memiliki potensi besar pada sektor perikanan, migas, dan perdagangan laut, stabilitas kawasan menjadi faktor penting dalam mendukung pemanfaatan sumber daya maritim secara optimal. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa meningkatnya ketegangan geopolitik di Laut Natuna Utara telah menimbulkan berbagai konsekuensi terhadap aktivitas ekonomi masyarakat pesisir, pengelolaan sumber daya alam, serta investasi di sektor maritim. Salah satu dampak yang paling nyata terlihat pada sektor perikanan. Menurut Ekaputra dkk (2025), praktik *Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing* (IUUF) yang dilakukan oleh kapal-kapal asing telah mengurangi potensi hasil tangkapan yang seharusnya dapat dimanfaatkan oleh nelayan Indonesia. Aktivitas penangkapan ikan ilegal tidak hanya menyebabkan kerugian ekonomi, tetapi juga mengancam keberlanjutan sumber daya perikanan di Laut Natuna Utara. Temuan tersebut diperkuat oleh Mira, Solihin, dan Tajerin (2013) yang menyatakan bahwa

praktik *illegal fishing* merupakan salah satu faktor utama yang menghambat pengembangan ekonomi wilayah perbatasan berbasis kelautan dan perikanan. Menurut mereka, meskipun Natuna memiliki potensi perikanan yang besar, pemanfaatannya belum optimal karena tekanan dari aktivitas penangkapan ikan ilegal yang dilakukan oleh pihak asing.

Dampak geopolitik juga dirasakan secara langsung oleh masyarakat nelayan di kawasan Natuna. Villia, Kaka, dan Subandi (2026) menjelaskan bahwa meningkatnya aktivitas kapal asing dan ketegangan di Laut Natuna Utara menciptakan rasa ketidakpastian bagi nelayan lokal dalam menjalankan aktivitas penangkapan ikan. Kondisi ini dapat memengaruhi produktivitas sektor perikanan karena sebagian nelayan menjadi lebih berhati-hati ketika beroperasi di wilayah yang sering menjadi lokasi pelanggaran oleh kapal asing. Namun demikian, temuan ini sedikit berbeda dengan penelitian Syahdanur dan As'ari (2017) yang menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat Natuna tidak merasa takut untuk melaut meskipun terdapat konflik dan isu keamanan di wilayah perbatasan. Perbedaan temuan tersebut menunjukkan bahwa dampak geopolitik terhadap aktivitas nelayan tidak selalu bersifat langsung, tetapi sangat dipengaruhi oleh persepsi masyarakat terhadap tingkat ancaman yang mereka hadapi. Selain sektor perikanan, tantangan geopolitik juga memengaruhi pengelolaan sumber daya energi di Laut Natuna Utara. Menurut Purwatiningsih dan Masykur (2012), kawasan Natuna memiliki cadangan minyak dan gas bumi yang sangat besar dan berpotensi menjadi salah satu penopang ketahanan energi nasional. Temuan ini diperkuat oleh Rianty dan Mulyanie (2025) yang menyatakan bahwa eksplorasi dan eksploitasi migas Natuna memiliki nilai strategis bagi perekonomian Indonesia. Namun, penelitian tersebut juga menegaskan bahwa ketidakstabilan geopolitik di kawasan Laut Natuna Utara dapat memengaruhi iklim investasi dan aktivitas eksplorasi energi. Kehadiran kapal asing serta potensi konflik di wilayah perairan sekitar Natuna berpotensi meningkatkan risiko operasional bagi perusahaan yang bergerak di sektor migas.



Gambar 4. Ancaman Geopolitik terhadap Ekonomi Politik di Laut Natuna Utara

Sumber: Diolah Penulis dari Berbagai Sumber

Di sisi lain, beberapa penelitian menunjukkan bahwa dampak geopolitik tidak hanya bersifat negatif, tetapi juga mendorong pemerintah untuk memberikan perhatian yang lebih besar terhadap pembangunan ekonomi wilayah perbatasan. Yudha dan Dina (2020) menjelaskan bahwa posisi strategis

Natuna sebagai kawasan perbatasan mendorong pemerintah untuk mengembangkan infrastruktur, pusat pertumbuhan ekonomi, dan konektivitas wilayah guna memperkuat keberadaan Indonesia di kawasan tersebut. Pendapat ini sejalan dengan Haerulloh dan Martani (2023) yang menegaskan bahwa pembangunan ekonomi daerah merupakan bagian dari strategi nasional dalam menjaga kedaulatan Laut Natuna. Dengan demikian, tantangan geopolitik justru menjadi pendorong bagi pemerintah untuk mempercepat pembangunan ekonomi maritim dan memperkuat kehadiran negara di wilayah perbatasan. Meskipun terdapat berbagai upaya penguatan ekonomi, sejumlah penelitian menunjukkan bahwa manfaat pembangunan belum sepenuhnya dirasakan oleh masyarakat. Syahdanur dan As'ari (2017) menemukan bahwa keterbatasan infrastruktur, tingginya biaya distribusi barang, serta kondisi ekonomi masyarakat pesisir masih menjadi hambatan dalam pengelolaan sumber daya laut. Temuan tersebut diperkuat oleh Mira, Solihin, dan Tajerin (2013) yang menunjukkan bahwa persoalan kelembagaan, akses modal, dan ketersediaan sarana produksi masih menjadi tantangan utama dalam pengembangan ekonomi wilayah perbatasan. Hal ini menunjukkan bahwa penguatan ekonomi maritim tidak dapat dilakukan hanya dengan menghadapi ancaman eksternal, tetapi juga harus disertai upaya penyelesaian berbagai persoalan struktural di dalam negeri.

Berdasarkan berbagai penelitian tersebut, dapat dipahami bahwa tantangan geopolitik di Laut Natuna Utara memiliki dampak yang kompleks terhadap ekonomi maritim Indonesia. Di satu sisi, konflik dan pelanggaran wilayah menghambat aktivitas perikanan, meningkatkan risiko investasi migas, dan mengancam keberlanjutan sumber daya laut. Di sisi lain, tekanan geopolitik juga mendorong pemerintah untuk mempercepat pembangunan ekonomi wilayah perbatasan sebagai bagian dari strategi mempertahankan kedaulatan negara. Oleh karena itu, penguatan ekonomi maritim di Laut Natuna Utara perlu ditempatkan sebagai bagian dari kebijakan strategis yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada penguatan posisi Indonesia dalam menghadapi dinamika geopolitik kawasan.

3.4. Strategi Penguatan Ekonomi Maritim Indonesia dalam Menghadapi Tantangan Geopolitik

Besarnya potensi ekonomi yang dimiliki Laut Natuna Utara serta kompleksitas tantangan geopolitik yang dihadapi menunjukkan bahwa Indonesia memerlukan strategi yang komprehensif dalam mengelola kawasan tersebut. Berbagai penelitian sepakat bahwa penguatan ekonomi maritim tidak dapat dipisahkan dari aspek keamanan, diplomasi, pengelolaan sumber daya alam, dan pembangunan wilayah perbatasan. Oleh karena itu, strategi yang diterapkan harus mampu mengintegrasikan berbagai sektor agar pemanfaatan sumber daya maritim dapat berjalan optimal sekaligus mendukung penguatan kedaulatan nasional.

a. Penguatan Keamanan Maritim dan Pengawasan Wilayah Laut

Salah satu strategi yang paling banyak dibahas dalam berbagai penelitian adalah penguatan keamanan maritim. Menurut Ekaputra dkk. (2025), praktik Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing (IUUF) masih menjadi ancaman utama bagi pemanfaatan sumber daya laut di Laut Natuna Utara. Aktivitas kapal asing yang memasuki wilayah ZEE Indonesia tidak hanya menyebabkan kerugian ekonomi, tetapi juga berpotensi mengganggu stabilitas keamanan kawasan. Temuan ini diperkuat oleh Villia, Kaka, dan Subandi (2026) yang menunjukkan bahwa peningkatan patroli TNI AL, penguatan peran Bakamla, dan pembangunan fasilitas pertahanan di Natuna merupakan langkah penting untuk menjaga stabilitas keamanan nasional.

Argumen tersebut sejalan dengan penelitian Haerulloh dan Martani (2023) yang menegaskan bahwa perlindungan wilayah perbatasan memerlukan sinergi antara kekuatan militer, aparat penegak hukum, dan masyarakat pesisir. Namun demikian, penelitian ini juga menunjukkan bahwa masih terdapat berbagai hambatan berupa keterbatasan armada patroli dan koordinasi antarinstansi yang belum optimal. Oleh karena itu, penguatan keamanan maritim perlu diarahkan tidak hanya pada peningkatan kapasitas pertahanan, tetapi juga pada integrasi kelembagaan dan sistem pengawasan laut yang lebih efektif.

b. Optimalisasi Potensi Perikanan Berbasis Blue Economy

Selain penguatan keamanan, strategi lain yang dinilai penting adalah optimalisasi sektor perikanan melalui pendekatan *blue economy*. Menurut penelitian mengenai penguatan ekonomi maritim di Laut Natuna Utara, konsep *blue economy* memungkinkan pemanfaatan sumber daya laut secara berkelanjutan dengan tetap menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan kelestarian lingkungan. Pendekatan ini menjadi penting karena sektor perikanan merupakan sumber penghidupan utama masyarakat pesisir sekaligus salah satu sektor unggulan Natuna.

Temuan tersebut diperkuat oleh Mira, Solihin, dan Tajerin (2013) yang menyatakan bahwa peningkatan produktivitas perikanan tangkap dan budidaya harus menjadi prioritas dalam pembangunan ekonomi wilayah perbatasan. Penelitian tersebut merekomendasikan pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPDN), penyediaan benih dan pakan, penguatan kelembagaan ekonomi, serta peningkatan kapasitas nelayan sebagai langkah untuk meningkatkan produktivitas sektor perikanan. Sementara itu, Syahdanur dan As'ari (2017) menegaskan bahwa keberhasilan pengelolaan sumber daya laut juga sangat dipengaruhi oleh kondisi sosial ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, kebijakan pengembangan sektor perikanan perlu memperhatikan kebutuhan masyarakat lokal agar manfaat ekonomi dapat dirasakan secara merata dan berkelanjutan.

c. Pengembangan Industri Migas sebagai Penggerak Ekonomi Maritim

Potensi minyak dan gas bumi yang dimiliki Natuna juga menjadi bagian penting dalam strategi penguatan ekonomi maritim Indonesia. Menurut Purwatiningsih dan Masykur (2012), cadangan migas di Laut Natuna bagian utara merupakan aset strategis yang dapat mendukung ketahanan energi nasional sekaligus meningkatkan penerimaan negara. Temuan ini diperkuat oleh Rianty dan Mulyanie (2025) yang menyatakan bahwa eksplorasi dan eksploitasi migas Natuna memiliki peran penting dalam mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor energi. Meskipun demikian, pengembangan sektor migas tidak terlepas dari tantangan geopolitik yang ada di kawasan Laut Natuna Utara. Oleh karena itu, pengelolaan sumber daya energi perlu didukung oleh kepastian hukum, stabilitas keamanan, dan kebijakan investasi yang mampu menarik partisipasi investor. Dengan demikian, pengembangan migas tidak hanya berkontribusi terhadap ketahanan energi nasional, tetapi juga dapat menjadi instrumen untuk memperkuat kehadiran Indonesia di wilayah perbatasan.

d. Pembangunan Ekonomi Wilayah Perbatasan

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa penguatan ekonomi maritim tidak akan berhasil tanpa pembangunan wilayah perbatasan yang memadai. Yudha dan Dina (2020) menjelaskan bahwa Natuna memiliki potensi besar untuk berkembang menjadi pusat pertumbuhan ekonomi kawasan perbatasan apabila didukung oleh infrastruktur yang memadai, aksesibilitas yang baik, dan pengembangan pusat-pusat ekonomi secara terintegrasi. Pendapat ini sejalan dengan Mira, Solihin, dan Tajerin (2013) yang menyoroti pentingnya pembangunan sarana transportasi laut, penyediaan energi, serta dukungan kelembagaan ekonomi bagi masyarakat pesisir. Namun demikian, penelitian Syahdanur dan As'ari (2017) menunjukkan bahwa masih terdapat berbagai kendala yang dihadapi masyarakat Natuna, seperti tingginya biaya logistik dan keterbatasan distribusi barang. Oleh karena itu, pembangunan wilayah perbatasan harus diarahkan pada peningkatan konektivitas, penguatan ekonomi lokal, dan penciptaan nilai tambah hasil produksi kelautan sehingga masyarakat dapat memperoleh manfaat yang lebih besar dari potensi sumber daya yang dimiliki.

e. Penguatan Diplomasi Maritim

Strategi terakhir yang tidak kalah penting adalah penguatan diplomasi maritim. Menurut Veronika, Balawanga, dan Subandi (2026), Indonesia selama ini lebih mengedepankan diplomasi preventif dalam menghadapi sengketa di Laut Natuna Utara. Pendekatan tersebut dilakukan melalui pengiriman nota diplomatik kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), penegasan posisi berdasarkan UNCLOS 1982, serta penguatan kerja sama melalui ASEAN dan berbagai forum

internasional. Temuan tersebut didukung oleh Yayat Ruyat (2020) yang menyatakan bahwa Indonesia perlu mengombinasikan diplomasi dengan penegakan hukum internasional dan penguatan pertahanan untuk menjaga kepentingan nasional di Laut Natuna. Namun, berbeda dengan pendekatan diplomasi yang lebih menekankan soft power, Villia, Kaka, dan Subandi (2026) berpendapat bahwa penguatan kerja sama pertahanan dan peningkatan kapasitas militer juga diperlukan sebagai bentuk deterrence terhadap potensi ancaman eksternal.

Perbedaan pandangan tersebut menunjukkan bahwa diplomasi dan pertahanan bukanlah dua pendekatan yang saling bertentangan, melainkan saling melengkapi. Dalam konteks Laut Natuna Utara, diplomasi berfungsi menjaga stabilitas hubungan internasional, sedangkan pertahanan berperan memastikan bahwa kepentingan nasional Indonesia tetap terlindungi. Berdasarkan berbagai penelitian yang telah dianalisis, dapat dipahami bahwa strategi penguatan ekonomi maritim Indonesia di Laut Natuna Utara harus dilakukan melalui pendekatan yang terintegrasi. Penguatan keamanan maritim, optimalisasi sektor perikanan, pengembangan migas, pembangunan wilayah perbatasan, dan diplomasi maritim merupakan komponen yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Keberhasilan pengelolaan Laut Natuna Utara tidak hanya ditentukan oleh kemampuan memanfaatkan sumber daya alam yang tersedia, tetapi juga oleh kemampuan negara dalam mengelola tantangan geopolitik yang terus berkembang di kawasan tersebut.



Gambar 5. Model Integrasi Penguatan Ekonomi Maritim

Sumber: Diolah Penulis dari Berbagai Sumber

4. KESIMPULAN

Laut Natuna Utara merupakan wilayah strategis yang memiliki peran penting bagi Indonesia, baik dari aspek ekonomi, geopolitik, maupun keamanan nasional. Kawasan ini memiliki potensi sumber daya maritim yang sangat besar, terutama pada sektor perikanan dan minyak serta gas bumi, yang dapat menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi nasional sekaligus memperkuat ketahanan energi Indonesia. Selain itu, posisi geografis Natuna yang berada di jalur strategis Laut Cina Selatan menjadikan wilayah ini memiliki nilai penting dalam menjaga kedaulatan dan kepentingan nasional Indonesia di kawasan perbatasan. Meskipun memiliki potensi ekonomi yang besar, pengelolaan Laut Natuna Utara menghadapi berbagai tantangan geopolitik yang kompleks. Klaim *Nine Dash Line* Tiongkok, praktik *Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing* (IUUF), kehadiran kapal asing di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, serta dinamika persaingan kekuatan di kawasan Indo-Pasifik menjadi faktor yang memengaruhi stabilitas kawasan. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa tantangan tersebut tidak

hanya berdampak pada aspek keamanan dan kedaulatan, tetapi juga memengaruhi aktivitas perikanan, pengelolaan sumber daya laut, investasi migas, dan pembangunan ekonomi wilayah perbatasan.

Hasil sintesis berbagai penelitian menunjukkan bahwa penguatan ekonomi maritim merupakan salah satu strategi yang dapat digunakan Indonesia dalam menghadapi tantangan geopolitik di Laut Natuna Utara. Strategi tersebut tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan harus melalui pendekatan yang terintegrasi. Penguatan keamanan maritim diperlukan untuk melindungi sumber daya laut dan menegaskan hak berdaulat Indonesia. Optimalisasi sektor perikanan berbasis *blue economy* penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir sekaligus menjaga keberlanjutan sumber daya laut. Pengembangan sektor migas berperan dalam memperkuat ketahanan energi nasional, sedangkan pembangunan wilayah perbatasan dapat meningkatkan kapasitas ekonomi lokal dan memperkuat kehadiran negara di kawasan strategis. Di sisi lain, diplomasi maritim tetap menjadi instrumen penting dalam menjaga stabilitas kawasan dan memperjuangkan kepentingan Indonesia sesuai prinsip hukum internasional. Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan ekonomi maritim dan penguatan kedaulatan nasional merupakan dua aspek yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Dalam konteks Laut Natuna Utara, keberhasilan Indonesia menghadapi tantangan geopolitik tidak hanya ditentukan oleh kekuatan pertahanan dan diplomasi, tetapi juga oleh kemampuan negara dalam mengelola serta mengoptimalkan potensi ekonomi maritim secara berkelanjutan. Oleh karena itu, sinergi antara keamanan maritim, pembangunan ekonomi, pengelolaan sumber daya alam, dan diplomasi perlu terus diperkuat agar Laut Natuna Utara dapat menjadi kawasan yang produktif, aman, dan mampu mendukung kepentingan nasional Indonesia dalam jangka panjang.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Putra, R. A. (2025). Ancaman IUUF (Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing) bagi keamanan maritim Indonesia di Laut Natuna Utara. *Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial*, 8(6).
- Haerulloh, A. A., & Martani, R. F. (2023). Strategi pertahanan laut dalam menjaga kedaulatan Indonesia di Laut Natuna. *Jurnal Lemhannas RI*, 11 (3), 187-199.
- Maulana, Y. S., Ibrahim, B., & Bunari. (n.d.). History of changing the name of Indonesia's exclusive economic zone in the South China Sea to the North Natuna Sea (1982–2017). *Nusantara Hasana Journal*, 3(2), 117-131.
- Mira, Solihin, A., & Tajerin. (2013). Strategi peningkatan ekonomi wilayah perbatasan berbasis kelautan dan perikanan (Studi kasus di Nanusa, Natuna, dan Nunukan). *Sosiokonsepsia*, 18(3), 255-278.
- Purwatiningsih, A., & Masykur. (2012). Eksplorasi dan eksploitasi pertambangan minyak dan gas bumi di Laut Natuna bagian utara laut yurisdiksi nasional untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kepulauan Natuna. *Jurnal Reformasi*, 2 (2), 59-66.
- Rianty, E. V., & Mulyanie, E. (2025). Tantangan penambangan gas dan minyak di Laut Natuna Indonesia. *Jurnal Ilmiah Universitas Siliwangi*, 15(9), 171-180.
- Ruyat, Y. (2020). Peran Indonesia dalam menjaga wilayah Laut Natuna dan menyelesaikan konflik Laut Tiongkok Selatan. *Jurnal Kajian Lemhannas*, 29(1), 67-75.
- Syاهدanur, & As'ari, H. (2017). Dampak sosial ekonomi, budaya terhadap keberhasilan pengelolaan sumber daya laut di pulau terluar Kabupaten Natuna. *Jurnal Ekonomi KIAT*, 29(2), 1-7.
- Veronika, Y., Balawanga, P. S. M., & Subandi, Y. (2026). Strategi diplomasi Indonesia dalam merespons sengketa maritim di Laut Natuna Utara dengan Tiongkok (2019–2020). *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 4(2), 221-228.
- Villia, L. G., Kaka, A. S., & Subandi, Y. (2026). Dampak konflik Laut Natuna Utara terhadap stabilitas keamanan Indonesia pada tahun 2021–2023. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 4(1), 94-101.
- Yudha, E. P., & Dina, R. A. (2020). Pengembangan potensi wilayah kawasan perbatasan negara Indonesia (Studi kasus: Ranai–Natuna). *Tataloka*, 22(3), 366-378.
- Ekaputra, A. A., Pramesti, A. A., Trianjeli, A., Sitompul, R. S., Susanti, P. (2025). Paradoks Kedaulatan Maritim Indonesia di Laut Natuna: Kritik terhadap Efektivitas Implementasi UU No. 32 Tahun 2014

tentang Kelautan dalam Menghadapi Ekspansionisme Regional. *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan CAUSA*, 15(9).